

**EVALUASI PROGRAM SISTEM PERINGATAN DINI PENGENDALIAN
PENDUDUK (SIPERINDU) DALAM PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI RIAU TAHUN 2022-2024**

Oleh: Alrahni Mayritan

Dosen Pembimbing: Dr. Baskoro Wicaksono, S.IP., M.IP.

Email: alrahni.mayritan4702@student.unri.ac.id

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. HR. Soebrantas KM. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru, 28293

ABSTRACT

Population issues are fundamental issues that have a direct impact on various aspects of life, from economics, social, politics, to the environment. Population is both the subject and object of development, so the success of national development is largely determined by how the government is able to manage the growth, distribution, and quality of its population. The SiPerindu application was created as an early warning tool for population problems, especially in Riau Province. This study aims to evaluate the Population Control Early Warning System Program (SiPerindu) by the Riau Province BKKBN Representative in 2022–2024 and analyze its impact on population control. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews and documentation with related parties, such as the Riau Province BKKBN Representative, DP3AP2KB Riau Province, DPPKB Pekanbaru City, and the Chairperson of the Population Coalition. The theory used is the program evaluation theory by William N. Dunn which includes 6 indicators, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy.

The results of this study indicate that the implementation of SiPerindu has not been optimal across all evaluation indicators. The main obstacles include limited human resources, lack of budget, missing data and infrastructure, and weak data integration between agencies. Despite this, the SiPerindu application has been used as a basis for the development of the Population Development Grand Design (GDPK) and the Roadmap For Population Development (PJPK). SiPerindu is also considered quite responsive in providing population data and has received positive feedback from the public. However, improvements in data updating and accessibility are still needed.

Keywords: Program Evaluation, SiPerindu, Population Control, BKKBN.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Masalah kependudukan di Indonesia menjadi isu strategis yang berdampak langsung terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi melalui kebijakan e-government sebagaimana diatur dalam Perpres No. 95 Tahun 2018. Salah satu implementasinya di bidang kependudukan adalah aplikasi Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (SiPerindu) yang dikelola oleh BKKBN.

Aplikasi ini berfungsi sebagai alat peringatan dini untuk memantau situasi kependudukan dan membantu pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan berbasis data yaitu Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). Namun, pelaksanaannya aplikasi SiPerindu ini belum optimal. Masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan data dan integrasi antarinstansi, kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur, serta minimnya sosialisasi dan anggaran.

Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas, efisiensi, serta ketepatan aplikasi SiPerindu belum tercapai secara maksimal dalam mendukung pengendalian kependudukan di Provinsi Riau. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi program Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (SiPerindu) Dalam Pengendalian Kependudukan Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Tahun 2022–2024 dengan menggunakan teori Evaluasi Program menurut William N. Dunn.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana evaluasi program SiPerindu Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Tahun 2022-2024?
2. Apa dampak yang ditimbulkan terhadap pengendalian Kependudukan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mendeskripsikan evaluasi program SiPerindu Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Tahun 2022-2024
2. Mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh SiPerindu terhadap Pengendalian Kependudukan

D. TINJAUAN TEORI

Penelitian ini menggunakan dua teori utama, yaitu teori *Electronic Government Maturity Models* dan teori Evaluasi Program menurut William N. Dunn (2003).

Teori Electronic Government Maturity Models

Teori ini menjelaskan tahapan perkembangan e-government dari tahap awal hingga tahap optimal, yang menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah telah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan layanan publik. Model ini terdiri atas lima tahap perkembangan:

1. Electronic Government (awal)
2. Open Government (pengembangan)
3. Data-Centric Government (pendefinisian)
4. Fully Digital Government (pengelolaan)
5. Smart Government (pengoptimalan)

Teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana digitalisasi pemerintah, dalam hal ini aplikasi SiPerindu, telah mendukung efektivitas pelayanan dan pengendalian penduduk berbasis data.

Teori Evaluasi Program (William N. Dunn, 2003)

Dunn menjelaskan bahwa evaluasi program merupakan proses menilai sejauh mana suatu program mencapai tujuannya secara efisien dan bermanfaat bagi masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui enam indikator:

1. Efektivitas: sejauh mana program mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Efisiensi: perbandingan antara hasil dan sumber daya yang digunakan.
3. Kecukupan: sejauh mana hasil program mampu memecahkan masalah yang ada.
4. Perataan : pemerataan manfaat program bagi seluruh kelompok sasaran.
5. Responsivitas: sejauh mana program menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
6. Ketepatan : kesesuaian hasil program dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Teori ini menjadi dasar untuk menilai implementasi SiPerindu sebagai program digital BKKBN dalam mendukung pengendalian penduduk di Provinsi Riau.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian yang menganalisis dan menghasilkan data yang berbentuk tulisan, ucapan serta tindakan dan perilaku orang-orang yang diamati. peneliti menetapkan penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2020-2050, Provinsi Riau menduduki tingkat ke-13 dari 38 Provinsi di Indonesia dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,39% yang dapat menimbulkan masalah-masalah kependudukan yang dapat mengganggu tatanan kehidupan

masyarakat Provinsi Riau. BKKBN Provinsi merupakan eksekutor utama kebijakan kependudukan nasional di daerah yaitu Perwakilan BKKBN Provinsi Riau dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Riau bisa menjadi studi kasus yang representatif untuk memahami bagaimana aplikasi SiPerindu berdampak pada pengendalian kependudukan. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori evaluasi program William N. Dunn dengan enam indikator untuk menilai kinerja aplikasi SiPerindu sebagai sistem peringatan dini kependudukan di Provinsi Riau, yaitu :

1. Efektivitas

SiPerindu dinilai efektif dalam membantu BKKBN dan mitra kerja (seperti DP3AP2KB dan DPPKB) mengidentifikasi kondisi kependudukan secara cepat. Data SiPerindu dimanfaatkan dalam penyusunan *Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK)* dan *Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK)*. Namun, aplikasi sering mengalami *error* saat input dan pembaruan data.

2. Efisiensi

Dari sisi efisiensi, penggunaan sumber daya manusia dan teknologi cukup optimal meskipun belum ada anggaran khusus. Sosialisasi dan pengelolaan dilakukan dengan dukungan SDM yang terbatas.

3. Kecukupan

Data yang tersedia di SiPerindu belum sepenuhnya lengkap. Tahun 2022 kecukupan data baru 60%, meningkat

menjadi 80% pada 2024. Kekosongan data (seperti indikator stunting, perkawinan anak, dan IBangga) menghambat analisis kebijakan secara menyeluruh.

4. Perataan

Sosialisasi dan pemanfaatan aplikasi dilakukan secara merata kepada seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Riau, termasuk instansi pemerintah, sekolah, dan mitra swasta. Namun, persebaran data dalam aplikasi masih belum merata antar kabupaten/kota.

5. Responsivitas

Program SiPerindu cukup responsif terhadap kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat. Fitur warna (biru, hijau, kuning, merah) mempermudah analisis situasi kewaspadaan kependudukan. Masyarakat dan sekolah menanggapi positif melalui *Sekolah Siaga Kependudukan*.

6. Ketepatan

Dari segi ketepatan, aplikasi ini sudah cukup tepat sasaran karena data yang ditampilkan digunakan untuk perencanaan kebijakan. Namun, kelemahannya adalah penginputan data tidak real-time, sehingga beberapa keputusan masih didasarkan pada data tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, SiPerindu memberikan dampak positif terhadap pengendalian penduduk di Provinsi Riau. Aplikasi ini memperkuat fungsi koordinasi antarinstansi, mempercepat akses data, dan meningkatkan kesadaran aparatur serta masyarakat terhadap pentingnya kebijakan berbasis data. Namun, masih ditemukan kendala struktural dan teknis, seperti:

- kurangnya pembaruan data secara cepat,
- keterbatasan SDM yang

menguasai sistem,

- belum tersedianya format *mobile app*, dan
- belum optimalnya koordinasi vertikal dan horizontal antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pelaksanaan program SiPerindu belum berjalan optimal pada seluruh indikator evaluasi menurut teori William N. Dunn (efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan). Meskipun secara konsep program ini relevan dan mendukung digitalisasi pemerintahan, implementasinya masih menghadapi kendala berupa data yang belum lengkap, sering terjadi error pada sistem, serta kurangnya SDM dan anggaran khusus untuk sosialisasi.

Namun demikian, SiPerindu memberikan dampak positif terhadap pengendalian kependudukan. Aplikasi ini telah membantu pemerintah daerah dalam menyediakan data kependudukan yang lebih terintegrasi dan akurat, mendeteksi masalah demografi secara dini, serta meningkatkan koordinasi antarinstansi. Data SiPerindu juga digunakan sebagai dasar penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).

Dengan demikian, SiPerindu merupakan inovasi digital yang signifikan bagi kebijakan kependudukan di Riau, tetapi masih memerlukan peningkatan dalam hal efektivitas, efisiensi, dan ketepatan implementasi agar hasilnya dapat lebih maksimal dan berkelanjutan.

2. Saran

- a. Perlu adanya penguatan infrastruktur dan teknologi agar aplikasi SiPerindu lebih stabil, mudah diakses, dan dapat dikembangkan dalam bentuk

- aplikasi mobile yang dapat diunduh oleh masyarakat luas.
- b. Tingkatkan upaya penyempurnaan data dengan cara perkuat integrasi BKKBN bersama instansi terkait untuk memastikan kelengkapan data pada seluruh indikator pilar kependudukan sehingga dapat digunakan secara maksimal dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) maupun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).
 - c. Pentingnya peningkatan sosialisasi dan pelatihan agar tidak mengalami kesulitan pada saat turun lapangan dalam memberikan pembinaan terkait aplikasi SiPerindu ini.
 - d. Kolaborasi Lintas Sektor agar dapat menguatkan koordinasi antara instansi (BPS, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Pendidikan, dan lainnya) diperlukan untuk memastikan integrasi data kependudukan yang valid dan mutakhir.

H. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press.
- Indrayani, Etin. (2020). *E-Government Konsep, Implementasi Dan Perkembangannya di Indonesia*. Pertama. Solok: LPP Balai Insan Cendekia.
- Kusuma Dewi, Dian Suluh. (2022). *UM Jakarta Press Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Edisi Pert. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- William, N. Dunn. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi ke 2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

JURNAL

- Adnan, Hasyim., and Kemal Ade Sekarwati. (2021). "Perancangan Arsitektur Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Berbasis Togaf ADM (Studi Kasus : BKKBN)." *Syntax Idea*, 3(5).
- Bwalya, Kelvin J. (2014). "E-Government Maturity Models." *International Journal of Software Engineering & Applications (IJSEA)*, 5(3).
- Fandi, Ridho Arif, Muhammad Jazman, Mona Fronita, and Eki Saputra. (2024). "Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Menggunakan Cobit 2019." *Jurnal Sistem Informasi*, 13(6).
- Hujran, Omar, Ayman Alarabiat, and Mohammad Al Suwaidi. (2023). "Analysing E-Government Maturity Models." *Electronic Government*, 19(1).
- Layne, Karen, and Jungwoo Lee. (2001). "Developing Fully Functional E-Government: A four Stage Model." *Government Information Quarterly*, 18.
- Rilani Kasim, Zhafirah Nuralifya, Yanti Aneta, and Sri Yulianty Mozin. (2024). "Penerapan E-Government melalui Aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) di Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1).
- Samsudin, and Winda Junarda. (2024). "Sistem Informasi Pelayanan Di Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara Berbasis Web." *Jurnal Informatika Teknologi Dan Sains (Jinteks)*, 6(1).
- Subarkah, Pungkas et al. (2024). "Pendampingan Teknologi Informasi E- Smart Care Sebagai Upaya

Pencegahan Stunting Secara Dini Pada Remaja Melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2).

WEBSITE

Annisa Dewi, Chiquita Puspa. (2024). “Peran Penting Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Industri 4.0 Dan Bonus Demografi Di Indonesia.” *Ombudsman Republik Indonesia*: 1.

Maryati. (2023). “BKKBN Luncurkan SiPerindu Untuk Bantu Atasi Masalah Kependudukan.” *antaranews.com*: 1.

Subagyo, Triyono. (2023). “BKKBN Luncurkan Aplikasi SiPerindu Untuk Jaga Penduduk Tumbuh Seimbang.” *antaranews.com*: 1.

Unik, Susanti. (2024). “BKKBN Luncurkan Laporan Kependudukan 2024, Dasar Kebijakan Berbasis Data yang Akurat.” *cakaplah.com*, 1.<https://www.cakaplah.com/artikel/serantau/16586/2024/10/07/bkkbn-riau-luncurkan-laporan-kependudukan-2024-dasar-kebijakan-berbasis-data-yang-akurat#sthash.9Xg0vYcZ.zVS5c0UW.dpbs>.

LAPORAN

Direktorat Analisis Dampak Kependudukan BKKBN. (2024). *Laporan Kependudukan Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: BKKBN.

Perwakilan BKKBN Provinsi Riau. (2024). *Laporan Kependudukan Provinsi Riau Tahun 2024*. Pekanbaru: Perwakilan BKKBN Provinsi Riau.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Riau.

Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk.

Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.

Peraturan Deputy Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan

Peringatan Dini Pengendalian
Penduduk.